

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada kedua Entitas tersebut. Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Tabel 1. 1 Penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan

No	Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Bengkalis	Tahun Anggaran	Penilaian BPK RI
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	2020	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	2021	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	2022	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	2023	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: BPK Data Olahan 2025

Kabupaten Bengkalis kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 untuk yang ke-12 kalinya secara berurutan. Pencapaian ini

menunjukkan adanya konsistensi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh BPK Perwakilan Riau pada tanggal 26 Mei 2025 setelah melalui serangkaian proses audit intensif selama 25 hari kerja, yaitu sejak 14 Februari hingga 19 Maret 2025.

Namun demikian, keberhasilan memperoleh opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas substantif dari laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi di Kabupaten Bengkalis masih tergolong rendah, yakni mencapai 68,44 persen, jauh dari target ideal sebesar 85 persen. Hal ini mengindikasikan masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan rekomendasi BPK, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta kesinambungan praktik tata kelola keuangan daerah. Selain itu, permasalahan teknis juga masih ditemukan, seperti keterlambatan dalam penyusunan laporan, kesalahan dalam klasifikasi akun, dan kurang konsistennya proses rekonsiliasi maupun verifikasi data keuangan.

Dengan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa kualitas laporan keuangan daerah tidak dapat dinilai dari capaian opini audit semata, tetapi juga harus mempertimbangkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK, integritas aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, serta kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai dan mengimplementasikan sistem akuntansi secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada faktor-faktor internal seperti kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan pemanfaatan teknologi informasi dipandang penting dan relevan untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis.

Meskipun terdapat peningkatan dalam capaian opini audit seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan berbagai kelemahan dalam praktik penyusunan laporan keuangan

daerah. Permasalahan umum yang sering ditemukan meliputi kesalahan dalam pencatatan transaksi, ketidaksesuaian klasifikasi akun, dan keterlambatan pelaporan. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan administratif belum sepenuhnya mencerminkan kualitas substansial dari informasi keuangan yang disampaikan. Dalam konteks ini, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memegang peran strategis dalam menentukan kualitas akhir laporan keuangan, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya.

Secara nasional, pemerintah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud pengawasan eksternal, di mana opini audit yang diberikan menjadi indikator utama kualitas pengelolaan keuangan. Namun demikian, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh suatu pemerintah daerah bukanlah jaminan terbebas dari kelemahan sistem, kesalahan penyajian, atau potensi kecurangan, melainkan untuk mencerminkan kewajaran penyajian laporan berdasarkan standar yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan daerah tidak bergantung pada pencapaian opini audit, tetapi juga pada konsistensi penerapan regulasi, kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung proses akuntansi dan pelaporan.

Di tingkat Provinsi Riau, BPK Perwakilan Riau setiap tahun menyerahkan LHP atas LKPD kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bengkalis. Hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis berhasil mempertahankan opini WTP secara berturut-turut selama 12 tahun. Pencapaian ini merupakan capaian positif, tetapi tetap menyisakan agenda penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, karena masih ditemukan permasalahan teknis seperti penatausahaan aset, rekonsiliasi antar SKPD, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan yang belum optimal. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak ditentukan oleh hasil audit akhir, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dalam memahami regulasi dan standar

akuntansi, efektivitas penerapan SAKD dalam proses pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keandalan, ketepatan waktu, dan akurasi laporan keuangan.

Secara khusus di Kabupaten Bengkalis, isu nyata yang muncul terkait kualitas laporan keuangan adalah belum meratanya kompetensi sumber daya manusia di setiap SKPD, perbedaan pemahaman terhadap kebijakan akuntansi daerah, serta kendala dalam pengoperasian sistem keuangan berbasis teknologi. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian opini audit dengan kualitas proses penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bengkalis menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat strategi peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem akuntansi keuangan, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi guna mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan bernilai guna bagi pengambilan keputusan publik.

Salah satu faktor yang diyakini berdampak langsung terhadap kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Kompetensi yang dimaksud meliputi pemahaman terhadap regulasi keuangan, kemampuan teknis dalam penyusunan laporan, serta keahlian dalam menjalankan sistem keuangan yang ada. Pegawai yang memiliki pemahaman mendalam tentang SAP dan akuntansi pemerintahan akan lebih mampu menyusun laporan secara tepat dan sesuai standar. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi akuntansi atau kurangnya pelatihan akan meningkatkan risiko kesalahan pelaporan yang dapat memengaruhi opini audit.

Di sisi lain, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) juga menjadi aspek penting dalam menunjang akurasi dan ketepatan laporan. SAKD berfungsi sebagai sistem yang mengatur mekanisme pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah daerah. Penerapan yang optimal akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih rapi, tertelusur, dan mudah diaudit. Namun, efektivitas sistem ini sangat tergantung pada sejauh mana pengguna

memahami prosesnya dan sejauh mana sistem tersebut dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan prosedur.

Faktor lainnya adalah pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem pelaporan keuangan. Aplikasi keuangan daerah seperti SIPD, SIMDA, dan *e-budgeting* dirancang untuk mempercepat proses pencatatan dan meningkatkan akurasi data. Teknologi juga memungkinkan integrasi informasi antar unit kerja dan mempercepat penyusunan laporan secara digital. Kendati demikian, keberhasilan TI dalam menunjang pelaporan tidak bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem tersebut secara efektif dan efisien.

Adapun kualitas laporan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana informasi keuangan dapat dipercaya, relevan, dan mudah dipahami oleh pengguna, baik internal maupun eksternal. Laporan yang berkualitas tinggi tidak memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan transparan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh kolaborasi antara kompetensi pelaksana, efektivitas sistem akuntansi, dan optimalisasi penggunaan teknologi.

Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi dan fiskal cukup besar di Provinsi Riau, juga dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan kualitas laporannya. Walaupun telah menerapkan berbagai sistem dan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, namun masih terdapat kendala pada aspek teknis maupun sumber daya manusia yang perlu dievaluasi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Bengkalis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan melalui penguatan kapasitas SDM, sistem, dan teknologi secara terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ucik Aisyah Putri, Hafidhah,(2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Sumenep. Hal ini berarti bahwa pegawai yang tidak berkompeten atau berkompeten tidak mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan, karena laporan keuangan tersebut dibuat sesuai dengan standart yang dibuat oleh pemerintah dan menggunakan software yang sama. Pegawai yang mengelola laporan keuangan sebelum melakukan pengelolaan laporan keuangan diberikan sebuah pelatihan mengenai cara mengelola laporan keuangan sesuai standart yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan SAKD saja belum mampu menjamin terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas, relevan, andal, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan sistem akuntansi seringkali masih bersifat formalitas administratif tanpa diikuti dengan pemahaman yang mendalam, konsistensi penerapan, serta pengawasan yang memadai. Selain itu, faktor lain seperti kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan terhadap regulasi, pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi cenderung lebih dominan dalam menentukan kualitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan tidak dapat bergantung pada penerapan sistem akuntansi, tetapi juga membutuhkan dukungan aspek lain yang saling melengkapi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta. Temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi saja belum cukup untuk menjamin peningkatan kualitas laporan keuangan. Meskipun pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai sistem berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi keuangan daerah dan sistem informasi akuntansi, kualitas laporan

keuangan lebih banyak ditentukan oleh faktor lain, misalnya kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maupun efektivitas pengendalian internal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa teknologi informasi berperan sebagai sarana pendukung, sementara kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem tersebut dioptimalkan oleh aparatur yang kompeten dan berintegritas.

Berdasarkan hasil dari ke 3 penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh karena laporan keuangan disusun berdasarkan standar yang seragam dan ditunjang oleh pelatihan serta penggunaan perangkat lunak yang telah ditetapkan pemerintah. Penerapan SAKD juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan, sebab keberadaan sistem akuntansi seringkali dijalankan secara administratif tanpa diimbangi pemahaman, konsistensi, dan pengawasan yang memadai. Demikian pula, pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu secara langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan apabila tidak diiringi dengan kompetensi aparatur, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, dan efektivitas pengendalian internal. Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan daerah tidak cukup bergantung pada satu faktor, melainkan memerlukan sinergi antara kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi yang konsisten, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta dukungan aspek tata kelola dan regulasi yang kuat.

Tujuan penelitian ini dilandasi oleh pentingnya kualitas laporan keuangan daerah sebagai instrumen akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas tidak mencerminkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kinerja. Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) serta berbagai temuan di lapangan masih menunjukkan adanya kendala, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan penyusunan, hingga lemahnya pengendalian internal.

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta kontribusi praktis sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ditetapkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi Sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Bengkalis?
2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Bengkalis?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Bengkalis?
4. Bagaimana Kompetensi Sumber daya manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Bengkalis.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah diajukan, adapun tujuannya dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Bengkalis.

2. Untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Bengkalis.
4. Untuk Menjelaskan Pengaruh Kompetensi Sumber daya manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang terkait Pengaruh Kompetensi Sumber daya manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Bengkalis serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis lainnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penelitian tentang pengaruh Kompetensi Sumber daya manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Bengkalis.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi pada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

- c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan guna memperluas pemahaman. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh akademisi sebagai referensi untuk penelitian terkait.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat untuk memastikan bahwa penelitian tidak terlalu dan tidak menyimpang dari rumusan masalah diatas, maka perlu adanya batasan masalah yang ditinjau. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada Pengaruh Kompetensi Sumber daya manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Bengkalis.

